



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 366-374

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sidoarjo dalam Penerimaan, Pembinaan, dan Pengawasan Organisasi Masyarakat

Meylisa Elviora<sup>1✉</sup>, Ananta Prathama<sup>2</sup>

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Email: [meylisaelviora@gmail.com](mailto:meylisaelviora@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menerima laporan keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) di wilayah Kabupaten Sidoarjo, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tersebut. Metode yang digunakan adalah Kualitatif melalui observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan penting dalam pembinaan dan pengawasan ormas, memastikan bahwa ormas yang terdaftar memenuhi syarat hukum yang berlaku. Namun, masih terdapat tantangan seperti radikalisme, kurangnya sumber daya, dan stigma negatif terhadap ormas tertentu. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sosialisasi regulasi yang lebih efektif, serta penguatan kerja sama dengan lembaga lain untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan ormas.

Kata Kunci: *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Sosial Politik*

## Abstract

This research aims to analyze the role of the National Unity and Political Agency in receiving reports on the existence of community organizations in Sidoarjo Regency, as well as the challenges faced in carrying out this task. (mass organizations) in Sidoarjo Regency, as well as the challenges faced in carrying out this task. The method method used is Qualitative through observation. The result of the research The results showed that the National Unity and Political Agency plays an important role in the the guidance and supervision of mass organizations, ensuring that registered mass organizations fulfill the applicable legal requirements. applicable legal requirements. However, there are still challenges such as radicalization, lack of resources, and negative stigma towards certain CSOs. certain mass organizations. This research recommends increasing the capacity of human resources in the National Unity and Political Unity Agency, socializing more effective regulations, and strengthening the stigma against certain mass organizations. Political Unity Agency, more effective socialization of regulations, as well as strengthening cooperation with other institutions to increase the effectiveness of with other institutions to improve the effectiveness of management.

Keywords: *National Unity and Political Agency, Community Organization, Socio-Political Organization*

## PENDAHULUAN

Pembangunan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan merupakan salah satu tujuan utama Negara Republik Indonesia. Dalam konteks ini, organisasi kemasyarakatan (ormas) memegang peranan yang sangat penting sebagai wadah partisipasi sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Organisasi massa tidak hanya berperan sebagai penyalur upaya kolektif tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat kohesi sosial dan menciptakan kesadaran kolektif di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan ormas yang sehat dan taat pada peraturan perundangundangan menjadi sangat penting. Adapun, perkembangan dinamika organisasi kemasyarakatan dan perubahan sistem pemerintahan telah menghasilkan paradigma baru dalam pengelolaan organisasi tersebut. Hal ini mempengaruhi cara masyarakat berinteraksi, bernegara, dan menjalani kehidupan berbangsa. Peningkatan jumlah organisasi masyarakat (ormas), serta penyebaran dan karakter kegiatan mereka dalam kehidupan demokrasi, semakin mendesak ormas untuk menjalankan peran, fungsi, dan tanggung jawabnya. Hal ini penting agar ormas dapat berkontribusi dalam mewujudkan dan melindungi negara Indonesia, dengan fokus pada upaya menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta cita-cita nasionalnya. Untuk memperkuat peran serta fungsi organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam pembangunan, diperlukan sistem pengelolaan ormas yang sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi yang sehat. Ini mencakup karakteristik sebagai organisasi nirlaba yang

demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel. (M. Saleh, Khair, Kafrawi, & Maulana Kafrawi, 2023)

Berkaitan dengan cita-cita nasional maka sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengelola organisasi-organisasi massa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memainkan peran strategis dalam proses penerimaan dan pengembangannya. Misi Badan Politik Kesatuan Bangsa adalah memastikan bahwa organisasi-organisasi masyarakat Indonesia tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan nilai-nilai Pancasila. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) harus mampu memadukan kepentingan pemerintah dengan aspirasi rakyat agar tercipta sinergi positif dalam pembangunan sosial politik.

Dalam konteks hukum, pendaftaran keberadaan Ormas oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Undang-Undang tersebut menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan peran serta masyarakat dalam proses pembentukan dan pengelolaan organisasi kemasyarakatan. Selain itu, negara berwenang membina ormas-ormas agar tetap menjalankan fungsinya sesuai dengan tujuan dan misi yang ditetapkan.

Namun tantangan untuk diterima oleh ormas tidak bisa diabaikan. Berbagai permasalahan seperti radikalisasi, intoleransi, dan konflik sosial kerap muncul dari relasi kekuasaan yang ada di organisasi massa, salah satu dari dampak tersebut adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), sebagai ganti dari Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Dikeluarkannya Perppu No 2 Tahun 2017, yang di keluarkan dengan alasan ancaman keamanan nasional dari paham anti pancasila atau radikalisme. (M. Yasid & Dalimnuthe, 2022).

Oleh karena itu, peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam seleksi dan pengawasan organisasi kemasyarakatan (ormas) semakin krusial untuk menjaga stabilitas sosial dan politik di Indonesia. Dalam konteks ini, pendekatan inklusif dan dialogis perlu diterapkan agar seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran Badan Kesatuan Politik Nasional serta tantangan yang dihadapinya dalam melaksanakan amanahnya. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat

berkontribusi pada pengembangan kebijakan publik di Indonesia dan memperkuat efektivitas pengelolaan organisasi kemasyarakatan.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menerima organisasi kemasyarakatan (ormas) serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tersebut. Juga Karakter kualitatif pada prinsipnya lebih mengunggulkan pada pandangan deskriptif kepada data- data yang didapat dari lapangan. Tidak hanya dari itu, kualitatif lebih mengarah pada sifat alamiah serta analisis datanya lebih mendalam (Ultavia, Jannati, Malahati, Wathrunnada & Saleh, 2023)

### 1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori utama:

- **Data Primer:** Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, termasuk pejabat di Kesbangpol, pengurus ormas, dan ahli hukum yang memahami regulasi terkait ormas. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai proses penerimaan ormas, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang diterapkan oleh Kesbangpol.
- **Data Sekunder:** Data sekunder diperoleh dari studi literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, laporan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini. Analisis terhadap dokumen-dokumen ini akan memberikan konteks hukum dan kebijakan yang lebih luas mengenai pengelolaan ormas di Indonesia.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik sebagai berikut:

- **Observasi Partisipatif:** Peneliti juga melakukan observasi terhadap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan ormas. Observasi ini bertujuan untuk memahami dinamika interaksi antara pemerintah dan masyarakat serta melihat bagaimana kebijakan diterapkan di lapangan.
- **Studi Dokumentasi:** Peneliti mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen

resmi terkait kebijakan ormas, seperti undang-undang, peraturan daerah, serta laporan-laporan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Analisis ini membantu dalam memahami kerangka hukum yang mengatur penerimaan ormas.

Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menerima organisasi kemasyarakatan serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam konteks hukum dan sosial di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan publik serta meningkatkan efektivitas pengelolaan ormas di tanah air.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dan Organisasi Masyarakat Serta Tantangan yang di hadapi

Menurut Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa " Badan/kantor kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota bertugas membantu bupati/wali kota dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten/kota." selanjutnya di dalam ayat (2) huruf d diatur mengenai Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten yang salah satunya adalah fasilitasi organisasi kemasyarakatan.

Organisasi kemasyarakatan merupakan wadah yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela, berlandaskan pada kesamaan aspirasi, keinginan, kebutuhan, kepentingan, dan tujuan tertentu. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan, guna mencapai visi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila (Al-Butary, Soemitra & Nawawi, 2022).

Organisasi Masyarakat sendiri merupakan bentuk dari kebebasan yang menjadi ciri khas sebuah negara demokrasi, dalam konteks Indonesia sendiri, hal ini diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Oleh sebab itu Masyarakat menjadikan pasal ini sebagai landasan mereka dan juga hak mereka untuk membuat perkumpulan-perkumpulan yang nanti akan disebut organisasi masyarakat, timbulnya perkumpulan-perkumpulan ini sedikit banyak merupakan hasil dari komposisi Masyarakat Indonesia yang begitu Majemuk sehingga memerlukan suatu kelompok yang memiliki paham pemikiran yang sama, Sejarah organisasi Masyarakat sendiri dapat ditarik jauh sebelum kemerdekaan Indonesia itu sendiri,

Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, organisasi kemasyarakatan berfungsi sebagai wadah utama bagi pergerakan kemerdekaan.

Beberapa di antaranya adalah Boedi Oetomo, Syarikat Dagang Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, serta berbagai organisasi pemuda lainnya. (Dzikri & Sri, 2022)

Berdasarkan hal tersebut, penting untuk ditekankan bahwa Organisasi Masyarakat harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yang dikenal sebagai *Staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara. Konsep ini diperkenalkan oleh Hans Nawiasky. Oleh karena itu, Pancasila berfungsi sebagai landasan utama bagi setiap organisasi kemasyarakatan yang dibentuk secara kolektif oleh masyarakat. Dengan demikian, tujuan dari pembentukan organisasi tersebut akan sejalan dengan tujuan negara Republik Indonesia. (Fuqoha & Sukendar, 2022)

Masalah yang muncul akibat keberadaan organisasi masyarakat perlu ditangani dengan serius oleh Badan Kesbangpol dan Linmas. Penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung dan berkontribusi pada kegiatan pemerintah, karena pemerintah, sekuat apapun, tidak akan mampu mencapai tujuannya tanpa dukungan dari masyarakat. Meskipun berbagai organisasi diberikan kebebasan, mereka tetap harus mematuhi peraturan dan hukum yang ditetapkan oleh undang-undang. (Ghasian, Novie & Herman, 2023)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo memiliki peran strategis dalam pengelolaan ormas di Indonesia. Sebagai lembaga pemerintah, Badan ini bertugas untuk menerima dan mencatatkan keberadaan ormas di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Proses ini melibatkan verifikasi dokumen dan pemeriksaan kelayakan organisasi berdasarkan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Dalam hal ini, Kesbangpol harus memastikan bahwa ormas yang diterima tidak hanya memenuhi persyaratan administratif tetapi juga memiliki visi dan misi yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila serta beberapa tugas dan fungsi lainnya yang sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintah Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik pasal 6 tentang tugas dan fungsi

Berdasarkan beberapa hal yang disampaikan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo sejatinya memiliki peran penting sebagai pengelola ormas, yang meliputi pembinaan, pengawasan, dan penerimaan ormas baru. Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab, Kesbangpol tidak hanya berfungsi sebagai regulator tetapi juga sebagai fasilitator yang menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui pembinaan, Kesbangpol berupaya untuk meningkatkan kapasitas

ormas agar dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan sosial politik di Indonesia. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh Kesbangpol sangat penting untuk memastikan bahwa ormas tidak menyimpang dari tujuan dan prinsip yang telah ditetapkan dalam hukum di wilayah Kabupaten Sidoarjo

Meskipun tugas ataupun fungsi yang sudah diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo, Nampak sudah jelas namun dalam pelaksanaannya di temukan berbagaimacam tantangan-tantangan yang perlu di perhatikan, salah satunya adalah Berbagai masalah seperti isu radikalisasi, intoleransi, dan konflik sosial seringkali timbul akibat dinamika ormas yang ada. Oleh karena itu, peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melakukan seleksi serta pengawasan terhadap ormas menjadi semakin krusial untuk menjaga stabilitas sosial dan politik di Indonesia selain itu pula Salah satu tantangan terbesar adalah munculnya ormas yang mengusung ideologi radikal atau intoleran. Kesbangpol harus mampu melakukan deteksi dini terhadap ormas semacam ini agar tidak mendapatkan legitimasi resmi. Namun, hal ini seringkali sulit dilakukan karena adanya tekanan dari berbagai pihak.

Dalam banyak kasus, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengalami keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara efektif. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya perhatian terhadap ormas yang berpotensi menimbulkan masalah sosial. Proses penerimaan ormas sering kali terhambat oleh kompleksitas regulasi yang ada. Banyaknya dokumen yang harus disiapkan serta prosedur administrasi yang panjang dapat membuat proses menjadi lambat dan menyulitkan bagi calon ormas.

Penerimaan Organisasi Masyarakat Di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pelayanan pencatatan keberadaan organisasi kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa Proses Pelayanan Pencatatan Keberadaan Ormas di Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo telah dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa Bakesbangpol berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap ormas yang terdaftar memenuhi prosedur hukum yang berlaku dan memiliki dasar hukum yang jelas.

Bakesbangpol Kabupaten Sidoarjo telah menjalankan proses administratif yang jelas dan terstruktur dalam pencatatan ormas. Ini termasuk pemeriksaan kelengkapan dokumen, seperti Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan susunan kepengurusan pencatatan ini juga dilaksanakan dengan memastikan ormas yang terdaftar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara dan Pancasila.

## SIMPULAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo memegang peran penting dalam pengelolaan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan (ormas) di wilayahnya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Permendagri Nomor 11 Tahun 2019, Kesbangpol bertugas untuk memastikan bahwa ormas yang terdaftar tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara. Proses pencatatan ormas di Kesbangpol Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan dengan baik, melalui pemeriksaan dokumen yang jelas dan terstruktur, serta memastikan ormas yang terdaftar tidak bertentangan dengan ideologi negara. Namun, dalam pelaksanaannya, Kesbangpol menghadapi tantangan serius seperti isu radikalisme, intoleransi, dan konflik sosial yang dapat timbul dari dinamika ormas. Oleh karena itu, pengawasan dan seleksi ormas menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan politik di Indonesia. Selain itu, Kesbangpol Kabupaten Sidoarjo juga menghadapi kendala keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan secara efektif. Proses administrasi yang kompleks dan prosedur yang panjang sering kali menghambat kelancaran penerimaan ormas baru. Oleh karena itu, meskipun sudah ada regulasi yang jelas, tantangan-tantangan ini perlu mendapat perhatian serius agar Kesbangpol dapat menjalankan tugasnya dengan optimal dalam menjaga keberagaman dan kesatuan bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anelda Ultavia B, Putri Jannati, Fildza Malahati, Qathrunnada, Shaleh, 2023, "Kualitatif : Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi", Jurnal Pendidikan Dasar 11 (2), 341-348
- Bagus Waskita, Erwin Putubasai, M. Harviend Gilang P, 2023, "Tugas Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung Dalam Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Tidak Terdaftar (Studi Kasus Khilafatul Muslimin Lampung)", Jurnal

Sosial dan Humanis, 8 (1), 1-17

Burhanuddin Al-Butary, Andri Soemitra, Zuhrial Nawawi, 2022, "Peran Ekonomi Ormas Islam Di Indonesia, Sebuah Studi Literatur", *El-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 5 (1), 17-37

Dwi Putranto Priyono, Wati Nilamsari, 2021, "Penyalahgunaan Hak Dan Wewenang Organisasi Masyarakat Di Kelurahan Kedaung, Tangerang Selatan, Banten", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 5 (2), 253-269

Dzikri Ghufuranillah & Sri Wahyuni, 2022, "Telaah Kedudukan Organisasi Kemasyarakatan dalam Sistem Ketatanegaraan Ditinjau dari Asas Kedaulatan Rakyat", *Res Publica : Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 6 (3), 346-355

Fuqoha & Sukendar, 2022, "Analisis Perubahan Undang-Undang Ormas Dalam Kerangka Demokrasi Konstitusional Dan Depolitisasi Islam Politik", *Al-Qisthas : Jurnal Hukum dan Politik* 13 (1), 37-62

I Gde Pasek Ari Krisnadana, I Gusti Bagus Suryawan, Ida Ayu Putu Widiati, 2022, "Kewenangan Pemerintah Dalam Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan", *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3 (1), 98-103

M. Saleh, Abdul Khair, Kafrawi, Rachman Maulana Kafrawi, 2023, "Peran Ormas Dalam Mendukung Kebijakan Program Pemberdayaan Daerah Gotong Royong Di Kecamatan

Taliwang Kab. Sumbawa Barat", *Jurnal Kompilasi Hukum* 8 (1), 74-79

Muhammad Yasid Nasution, Dermina Dalimunthe, 2022, "Pembubaran HTI Ditinjau menurut PERPPU No. 2 Tahun 2017 Tentang Ormas", *Jurnal El-Thawalib* 3 (5), 765-775

Oktavianus Ghasian Tatipang, Novie R. Pioh, Herman Nayoan, 2023, "Pengawasan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Terhadap Organisasi Masyarakat Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro", *Jurnal Governance* 3 (1), 1-7.